

**PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT MELALUI PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Strata-2
Program Studi Magister Kenotariatan



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

ABSTRAK

Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, kepentingan manusia terhadap tanahpun juga meningkat dari pertumbuhan populasi manusia, tak heran apabila kepentingan setiap manusia terhadap tanah dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan terhadap penggunaan, kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah, Indonesia sendiri mengatur ketentuan pertanahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hadirnya UUPA ini adalah ketentuan pokok dari penggunaan dan pengaturan tanah di Indonesia, selain itu untuk mengatur pengelolaan pertanahan dibentuk suatu badan yang dikenal dengan Badan Pertanahan Nasional, badan ini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pelayanan penyelenggaraan setiap urusan pertanahan, salah satunya untuk kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah ditujukan untuk upaya memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap pemegang hak atas tanah dengan hasil akhir diterbitkannya suatu sertipikat. Salah satu upaya untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tanah adalah dengan hadirnya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilaksanakan oleh Negara, dengan hadirnya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 yang kemudian diatur didalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 6 tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan PTSL. Hadirnya PTSL memberikan kemudahan dalam proses Pendaftaran tanah dimana memiliki kekhususan dan pelaksanaan yang cepat sehingga memiliki perbedaan dengan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran tanah apakah sudah mampu menciptakan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Metode dari penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melaksanakan pendaftaran tanah khususnya di Sumatera Barat memerlukan beberapa syarat yakni adanya Keputusan KAN selaku Lembaga adat setempat dan hal-hal lain yang dirasa sulit bagi masyarakat untuk melengkapi syarat formil dalam pendaftaran tanah kegiatan rutin sehingga dengan hadirnya PTSL memberikan ruang dan kemudahan terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada Kantor Kabupaten Solok Selatan pada kegiatan PTSL tahun 2023 dilaksanakan dengan capaian target sebanyak seratus persen dengan rata-rata alas hak yang dapat dilihat lebih sederhana dari pada pendaftaran tanah kegiatan rutin sehingga menciptakan efisiensi waktu dan biaya.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, PTSL, Sertipikat

REGISTRATION OF TRADITIONAL OWNED LAND THROUGH A COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM IN SOLOK SELATAN DISTRICT

ABSTRACT

Land is a gift from God Almighty to humans, human interest in land is also increasing due to human population growth, it is not surprising that every human's interest in land can give rise to a conflict of interest regarding the use, ownership and control of land, Indonesia itself regulates land regulations through Law -Law Number 5 of 1960. The presence of this UUPA is the basic provision for the use and regulation of land in Indonesia, apart from that, to regulate land management, a body known as the National Land Agency was formed, this body was given the authority to regulate and manage services for the implementation of all land affairs , one of which is for land registration activities. Land registration activities are aimed at providing legal certainty and protection to every holder of land rights with the final result being the issuance of a certificate. One effort to create legal certainty regarding land is the presence of Systematic Land Registration activities carried out by the State, with the presence of Presidential Instruction Number 2 of 2018 which is then regulated in Minister of Agrarian Spatial Planning Regulation Number 6 of 2018 to carry out PTSL activities. The presence of PTSL makes it easier in the land registration process which has specificity and fast implementation so that it is different from Land Registration which is regulated in PP Number 24 of 1997. The aim of this research is to find out whether the land registration process is able to create legal protection and guarantee legal certainty. to land rights holders. The method of this research is empirical juridical, namely the juridical approach which means the law is seen as a norm or das sollen, because carrying out land registration, especially in West Sumatra, requires several conditions, namely the existence of a KAN Decree as the local customary institution and other things that are considered difficult for the community to complete the formal requirements for routine land registration activities so that the presence of PTSL provides space and convenience for the implementation of land registration. Based on the results of research found in Kantah, South Solok Regency, PTSL activities in 2023 were carried out with a target achievement of one hundred percent with an average title base that can be seen to be simpler than routine land registration activities, thereby creating time and cost efficiencies.

Keywords: *Land Registration, PTSL, Certificate*